

**WUJUD SINERGITAS KUAT, KAKANWIL KEMENKUMHAM D. I. YOGYAKARTA HADIRI PUNCAK  
PELAYANAN PUBLIK OMBUDSMAN**

Sabtu, 14 September 2019 - Septiandita Arya Muqovvah

YOGYAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta, Krismono menghadiri acara Pekan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Perwakilan DIY pada Sabtu (14/9/19). Acara Pekan Pelayanan Publik tersebut merupakan puncak dari serangkaian agenda kegiatan terkait pelayanan publik yang mulai diselenggarakan Ombudsman Perwakilan DIY sejak 9 September 2019 lalu. Bentuk konkret dari agenda kegiatannya yaitu dengan membuka pos pengaduan di RSUD Wirosaban, RSUP Sardjito, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Ketua Ombudsman Perwakilan DIY, Budhi Masturi dalam sambutannya menyampaikan bahwa diadakannya acara Pekan Pelayanan Publik adalah untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Ombudsman kepada masyarakat. Tema yang diusung dalam acara tersebut adalah "Jogja Ora Nyampah", maksudnya dengan acara itu diharapkan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap praktik pengolahan sampah yang menyimpang. Selain itu, Budhi juga menyampaikan bahwa maksud diadakannya acara ini adalah untuk mendorong pemerintah agar lebih responsif dalam melakukan pengelolaan sampah.

Setelah itu, acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham D. I. Yogyakarta, Krismono. Dalam sambutannya, Krismono menyampaikan apresiasinya kepada Ombudsman yang telah mampu berkolaborasi dengan sangat baik dengan Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta.

"Acara Pekan Pelayanan Publik ini dikemas dengan sangat bagus dan santai, ini adalah ajang untuk mensosialisasikan Ombudsman kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada Ombudsman yang selama ini telah mengawasi dan mendampingi Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat", jelasnya dalam acara yang diselenggarakan di Mall Malioboro, Yogyakarta tersebut.

Krismono juga menambahkan public campaignnya terkait proses pembangunan zona intergritas menuju wilayah bebas dari bebas dari korupsi yang sedang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta. Doa, dukungan, dan pengawasan baik dari masyarakat maupun stakeholder terkait sangat diperlukan demi keberhasilan Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta untuk meraih predikat instansi wilayah bebas dari korupsi.